

MODEL PEMBIAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIF: MENUJU TERCAPAINYA SDGs DI SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM INDONESIA

Erik junaidi¹, Muhammad Zaenul Lael², Shaleh³, Saddam Husin⁴

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta¹²³⁴

erickelkayeli@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan model pembiayaan pendidikan inklusif dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada sektor pendidikan Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pengumpulan data dilakukan melalui kajian terhadap berbagai karya tulis ilmiah yang relevan, sesuai dengan tinjauan pustaka, tanpa adanya manipulasi atau penambahan data lainnya. penelitian ini menganalisis berbagai sumber pendanaan dan strategi pengelolaan pendidikan inklusif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi pembiayaan pendidikan inklusif memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pendanaan pemerintah (melalui Bantuan Operasional Sekolah dan dana desa), kontribusi sektor swasta, filantropi Islam (zakat dan wakaf), dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini mengidentifikasi tiga tahap utama dalam manajemen pembiayaan pendidikan: penganggaran, akuntansi, dan pengendalian, yang harus dilaksanakan secara efektif untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Penelitian ini juga menyoroti berbagai strategi pembiayaan yang telah dilaksanakan di Indonesia, termasuk Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), peningkatan alokasi anggaran pendidikan, pendanaan berbasis desa, inisiatif crowdfunding, kemitraan publik-swasta, dan pemanfaatan teknologi keuangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencapaian SDGs dalam pendidikan Islam memerlukan komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan infrastruktur pendukung, dan memastikan akses yang sama bagi semua anggota masyarakat, khususnya untuk kelompok rentan dan mereka yang berkebutuhan khusus.

Kata Kunci. Pembiayaan Pendidikan, Pendidikan Inklusif, Pendidikan Islam

ABSTRACT

This study aims to analyse the application of an inclusive education financing model in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) in the Islamic education sector in Indonesia. This research uses a descriptive qualitative approach with a library research method. Data collection was carried out through a review of various relevant scientific papers, in accordance with the literature review, without any manipulation or addition of other data. This research analyses various sources of funding and strategies for managing inclusive education. The research findings reveal that successful implementation of inclusive education financing requires a comprehensive approach involving various stakeholders, including government funding (through School Operational Assistance and village funds), private sector contributions, Islamic philanthropy (zakat and waqf) and community participation. This research identifies three key stages in education financing management: budgeting, accounting and controlling, which must be implemented effectively to optimise resource utilisation. It also highlights various financing strategies that have been implemented in Indonesia, including the Poor Students Assistance Programme (BSM), increased education budget allocations, village-based funding, crowdfunding initiatives, public-private partnerships and the utilisation of financial technology. The study concludes that achieving the SDGs in Islamic education requires a sustained commitment to improving the quality of education, developing supporting infrastructure and ensuring equal access for all members of society, particularly for vulnerable groups and those with special needs.

Keywords. Education Financing, Inclusive Education, Islamic Education

PENDAHULUAN

Pendidikan dapat dimaknai sebagai tindakan yang mencakup berbagai aspek, seperti metode, cara, dan pendekatan, serta sebagai pengetahuan mengenai proses mendidik. Pendidikan juga melibatkan upaya pemeliharaan, pengasuhan, dan pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan baik kesehatan maupun rohani (Asiva Noor Rachmayani, 2015). Dalam Surat Al-Mujadalah ayat 12 sampai 13 menekankan pentingnya pengelolaan dan dukungan terhadap pendidikan Islam. Ayat-ayat ini juga menyoroti nilai keteraturan dan keadilan sebagai prinsip utama dalam pendidikan Islam (Khairunnisa et al., 2024). Pendidikan adalah sarana pemberdayaan untuk menciptakan kemajuan berbudaya dan menghasilkan SDM berkualitas bagi pembangunan bangsa. Sebagai makhluk terpelajar, manusia belajar dan mendidik, membentuk individu utuh. Namun, kualitas pendidikan yang merata penting, terutama bagi generasi transisi (Khaidir Fadil et al., 2023).

Dalam Pertumbuhan ekonomi nasional tidak selalu berdampak langsung pada pemerataan, dan kebijakan yang mendorong pertumbuhan seringkali memperparah kesenjangan sosial. Akibatnya, kesejahteraan hanya dirasakan sebagian kecil masyarakat, sementara banyak yang tetap miskin. Oleh karena itu, pemerintah perlu fokus pada pembangunan berkelanjutan yang mencakup layanan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial untuk menciptakan kesejahteraan bersama (Usman et al., 2024). Pembangunan sistem pendidikan tidak akan bermakna jika tidak selaras dengan pembangunan nasional. Sebagai bagian dari sistem sosial budaya, pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, sehingga masalah internalnya menjadi kompleks. Contohnya, kualitas hasil belajar di sekolah sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sekitar, serta faktor-faktor lain di luar sistem pendidikan (Alamsyahbana et al., 2022). Di era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi, tantangan semakin kompleks. SDGs yang diadopsi PBB pada tahun 2015 menjadi kerangka untuk pembangunan berkelanjutan, termasuk di bidang pendidikan. Namun, peran pendidikan di sekolah dalam mendukung SDGs, terutama di Indonesia, masih kurang mendapat perhatian dalam kajian akademik dan diskusi publik (Asdlori, 2023).

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah kerangka aksi global yang dirancang oleh PBB pada 2015, termasuk disepakati oleh Indonesia, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Dengan 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan tercapai pada 2030, SDGs bertujuan mengakhiri kemiskinan, mengatasi kesenjangan, dan menangani perubahan iklim. Keberhasilan SDGs membutuhkan peran aktif pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat, akademisi, dan masyarakat (Humaida et al., 2020). Pendanaan SDGs melibatkan berbagai pihak yang berkomitmen untuk mencapai tujuannya. Selain dana pemerintah, seperti dana desa, diperlukan dukungan dari sektor swasta, filantropi, dan keuangan syariah yang terus berkembang. Zakat berperan penting dalam mendukung tujuan SDGs, khususnya terkait pengentasan kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi ketimpangan (Sri Rokhlinasari, 2023). Dengan demikian, Integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam sistem pendidikan, termasuk pendidikan Islam, adalah langkah strategis untuk membekali generasi masa depan dengan kesadaran, kompetensi, dan tanggung jawab global. Pendidikan ini membentuk karakter siswa yang peduli lingkungan, kesejahteraan sosial, dan nilai-nilai etika, sehingga mereka mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan dunia (Wulandari, 2024).

Keberagaman dan kompleksitas pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan peran pentingnya dalam menciptakan sumber daya manusia berkualitas yang kompetitif secara global. Transformasi pendidikan Islam mencakup pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman, pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat pendukung, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik (Sudaryo, 2024). dengan adanya program Sustainable Development Goals (SDGs) ini di harapkan Pendidikan Islam di Indonesia dapat berkontribusi signifikan terhadap pencapaian SDGs dengan mengintegrasikan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan ke dalam kurikulum. Ini dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan, penguatan nilai moral dan sosial, optimalisasi filantropi Islam seperti zakat dan wakaf, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembelajaran dan pembangunan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model pembiayaan pendidikan inklusif dalam mendukung tercapainya SDGs di sektor pendidikan Islam di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baru, menambah wawasan, serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research). Teknik ini melibatkan pengumpulan informasi dari karya tulis ilmiah yang relevan dengan tinjauan pustaka tanpa manipulasi data tambahan. Penelitian ini menggabungkan metode deskriptif dan kualitatif, dengan sumber utama berupa buku, artikel jurnal, internet, serta tulisan lain yang mendukung kajian literatur. (Ridwan et al., 2021)

Terkait dengan metode ini: I Made Winarta menjelaskan bahwa metode analisis deskriptif kualitatif melibatkan proses analisis, penggambaran, dan ringkasan dari berbagai kondisi yang diperoleh dari kumpulan informasi yang diperoleh melalui hasil wawancara atau observasi langsung di lapangan terkait dengan masalah penelitian (I Made Winartha, 2006). Sugiyono menambahkan bahwa metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menjelaskan data secara mendalam dengan peneliti berpartisipasi aktif dalam menginterpretasikan informasi yang tersedia (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kondisi Pembiayaan Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang dirancang untuk melibatkan semua peserta didik, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, dalam pembelajaran di sekolah reguler. Sistem ini berlandaskan pada prinsip kesetaraan, partisipasi, dan penghargaan terhadap keberagaman (Nasir, 2024). Pembelajaran di SPPi dilakukan seperti di kelas reguler, namun pada waktu tertentu dimodifikasi sesuai kebutuhan PDBK (Peserta Didik Berkebutuhan Khusus). PDBK juga mendapat pendampingan khusus di ruang inklusif oleh Guru Pendamping Khusus (GPK). Guru kelas merancang rencana pembelajaran untuk siswa reguler melalui RPP, sedangkan PDBK diberikan Program Pembelajaran Individual (PPI) yang dirancang sesuai karakteristik dan kebutuhan unik masing-masing individu (Dewi et al., 2024).

Dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia, Pengelolaan sumber dana merupakan aspek penting dalam mendukung pendidikan inklusif di Indonesia, termasuk di sektor pendidikan Islam. Pendanaan berasal dari pemerintah, seperti BOS dan dana desa, serta

kontribusi swasta, filantropi Islam seperti zakat dan wakaf, dan masyarakat. Keuangan syariah berperan besar dalam pembiayaan pendidikan melalui inisiatif berbasis solidaritas sosial, seperti pemberdayaan lembaga pendidikan Islam yang melayani siswa berkebutuhan khusus. Strategi ini mendukung kesetaraan pendidikan sekaligus berkontribusi pada pencapaian SDGs. Dalam Perencanaan dalam manajemen keuangan melibatkan upaya merancang sumber dana untuk mendukung kegiatan pendidikan dan mencapai tujuan yang ditetapkan oleh lembaga sekolah (Jannah, 2024).

Biaya pendidikan di Indonesia masih menjadi masalah krusial. Meski tidak sepenuhnya mempengaruhi kualitas pendidikan, pembiayaan sangat berpengaruh pada kelancaran pembelajaran, termasuk menggaji guru dan menyediakan sarana prasarana. Meskipun ada tuntutan reformasi untuk pendidikan murah dan berkualitas, pendidikan berkualitas tetap memerlukan biaya yang besar. Oleh karena itu, sekolah harus mampu mengelola keuangan dengan baik melalui RAPBS, menghindari pengeluaran yang tidak perlu, serta menjamin efisiensi waktu dan biaya. Efektivitas pembiayaan menjadi indikator efisiensi untuk mencegah pemborosan, terutama dalam operasional, pemeliharaan, dan pengadaan sumber belajar (Ferdinandus, 2013). Adapun sumber dana pendidikan itu bersementera dari pemerintah pusat dan daerah, yang berkontribusi dengan orang tua/wali siswa, masyarakat, serta alokasi lembaga pendidikan. Pembiayaan ini diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mencakup dana BOS, BMS, dan dukungan lainnya.

Menurut Masditou (2017), pembiayaan pendidikan melibatkan tiga tahapan utama:

1. Perencanaan Pembiayaan (Budgeting)
Tahap ini bertujuan memastikan penggunaan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan.
2. Akuntansi (Accounting)
Merupakan proses pencatatan, penggolongan, pelaporan, peringkasan, dan analisis data keuangan. Dalam lembaga pendidikan, akuntansi bertujuan memberikan gambaran tentang kondisi keuangan.
3. Evaluasi (Controlling)
Evaluasi dilakukan dengan membuat pertimbangan berdasarkan kriteria yang telah disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan (Nadhifa Ardiana et al, 2024).

Dengan demikian, pembiayaan pendidikan meliputi tiga tahapan utama: *perencanaan pembiayaan* untuk memastikan alokasi sumber daya yang efisien, *akuntansi* untuk mencatat dan menganalisis kondisi keuangan lembaga, serta *evaluasi* untuk menilai pencapaian berdasarkan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan ini bertujuan mendukung pengelolaan keuangan pendidikan secara efektif.

Model Pembiayaan Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif berasal dari istilah “inklusi”, yang menurut KBBI berarti sebuah ideologi untuk menciptakan lingkungan terbuka yang melibatkan semua orang tanpa memandang status sosial, ekonomi, karakteristik, kondisi tertentu, suku, ras, atau agama. Pendidikan inklusif berarti pendidikan yang menerima semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki karakteristik atau kondisi khusus, untuk belajar bersama di lingkungan sekolah yang sama dengan layanan yang setara. Pendekatan ini bertujuan menciptakan sekolah yang inklusif, di mana anak berkebutuhan khusus juga dapat

berpartisipasi dan mendapatkan pendidikan sesuai kebutuhan dan kemampuan melalui sistem, metode, dan pembelajaran yang tepat (Muchamad Irvan, 2018).

Indonesia memiliki berbagai pengalaman dalam menerapkan strategi pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan akses, mutual, dan kesetaraan dalam sistem pendidikan. Pengalaman penting meliputi:

1. Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)
Program ini memberikan bantuan keuangan kepada siswa dari keluarga miskin untuk mendukung akses pendidikan dasar dan menengah, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan partisipasi.
2. Peningkatan Alokasi Dana Pendidikan
Pemerintah telah meningkatkan dana untuk pendidikan, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan gaji guru, dan penyediaan buku pelajaran guna meningkatkan mutu pendidikan.
3. Pendanaan Berbasis Desa (Dana Desa)
Program ini memungkinkan desa mengalokasikan sebagian dana untuk pendidikan, seperti pembangunan sekolah dan program pendidikan lainnya, memberikan kontrol lebih besar kepada komunitas lokal (Fihana, 2024).
4. Pendanaan Nasional Berbasis Hasil
Beberapa provinsi menerapkan pembiayaan berdasarkan pencapaian lembaga pendidikan, seperti tingkat kelulusan dan hasil ujian, untuk mendorong perbaikan hasil pendidikan.
5. Pembiayaan Berbasis Crowdfunding
Inisiatif crowdfunding digunakan untuk menumpuk proyek pendidikan, seperti pembangunan sekolah, beasiswa, dan pengadaan peralatan pendidikan.
6. Kemitraan Publik-Swasta
Kemitraan ini melibatkan kontribusi sektor swasta, seperti program CSR, untuk mendukung pendidikan, termasuk pengembangan sekolah.
7. Pembiayaan Berbasis Teknologi
Teknologi keuangan (FinTech) dimanfaatkan untuk mempermudah penggalangan dana dan pembayaran pendidikan melalui aplikasi seluler dan platform bold.

Pengalaman ini menunjukkan langkah-langkah signifikan dalam memperbaiki pembiayaan pendidikan dan meningkatkan akses serta mutu. Namun, masih ada tantangan dalam efisiensi pengelolaan dana dan alokasi sumber daya untuk memastikan pendidikan berkualitas bagi semua. Komitmen dan kolaborasi yang kuat dari berbagai sektor sangat diperlukan untuk memastikan perubahan model pembiayaan pendidikan berjalan secara berkelanjutan dan inklusif. Keberlanjutan berarti model pembiayaan harus mampu memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat secara terus-menerus, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Inklusivitas berarti model tersebut harus mencakup seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat latar belakang sosial ekonomi. Dengan mengutamakan keinginan dan inklusivitas, pendidikan dapat menjadi hak sekaligus motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Pendidikan berkualitas meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Beberapa langkah untuk mendorong perubahan signifikan dalam model pembiayaan pendidikan meliputi:

1. Peningkatan Anggaran Pendidikan

Pemerintah perlu secara signifikan meningkatkan anggaran pendidikan dan mengalokasikannya secara proporsional untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat secara merata.

2. Kesadaran Masyarakat

Masyarakat perlu memahami bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang memberikan manfaat besar bagi individu, keluarga, dan masyarakat.

3. Peran Aktif Swasta

Sektor swasta perlu memberikan kontribusi lebih besar melalui pendanaan, penyediaan sarana prasarana, atau program pendidikan lainnya (Masyhura, 2024).

Perubahan model pembiayaan pendidikan merupakan proses kompleks yang membutuhkan waktu. Namun, dengan komitmen dan kerja sama dari semua pihak, perubahan ini dapat terwujud dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat luas.

Strategi Pencapaian SDGs

Pada era revolusi industri 5.0 yang serba modern saat ini, penyelenggaraan pendidikan menjadi tantangan bagi banyak negara, termasuk Indonesia, dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas, humanis, mudah diakses, dan merata. Hal ini penting mengingat sistem pendidikan di Indonesia masih belum sepenuhnya meluas, sehingga banyak masyarakat yang belum dapat memenuhi haknya untuk memperoleh pendidikan dan kehidupan yang layak. Revolusi industri 5.0 di bidang pendidikan merupakan respons untuk menciptakan individu yang kreatif dan inovatif dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan (Vania Sasikirana, 2020).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan pada Sidang Umum PBB untuk agenda 2030 diharapkan dapat mengatasi masalah pendidikan di Indonesia. Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam sistem pendidikan, seperti kurangnya keseriusan pemerintah, pengaruh politik, orientasi yang berfokus pada pelayanan administratif, dan lemahnya SDM pengelola pendidikan. Untuk mendukung SDGs, khususnya pada tujuan ke-4 yang menargetkan pendidikan berkualitas, setara, inklusif, dan pembelajaran seumur hidup, ada beberapa target utama yang perlu dicapai pada 2030: (1) Pendidikan dasar dan menengah gratis, berkualitas, dan setara untuk semua anak. (2) Akses pendidikan anak usia dini yang berkualitas. (3) Kesempatan yang setara untuk pendidikan teknik, kejuruan, dan perguruan tinggi yang terjangkau. (4) Peningkatan jumlah pemuda dan dewasa dengan keterampilan kerja yang relevan. (5) Penghapusan kesenjangan gender dan dukungan pendidikan untuk kelompok rentan. (6) Peningkatan kemampuan literasi dan numerasi remaja serta dewasa. (7) Pendidikan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, HAM, kesetaraan gender, dan budaya damai. (8) Fasilitas pendidikan yang inklusif, aman, dan nyaman. (9) Peningkatan jumlah beasiswa untuk negara berkembang. (10) Peningkatan kualitas guru melalui pelatihan internasional (Safitri et al., 2022).

Melalui langkah-langkah ini, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai target SDGs 2030. Alignment dengan SDGs di Lembaga Pendidikan. Penyelarasan dengan SDGs dalam lembaga pendidikan bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kurikulum, pengelolaan, dan kegiatan institusi. Ini meliputi:

1. Kurikulum Inklusif: Memasukkan pembelajaran tentang keberlanjutan, kesetaraan

- gender, dan pembangunan berkelanjutan.
2. Fasilitas Ramah Lingkungan: Menerapkan infrastruktur yang mendukung energi terbarukan dan efisiensi sumber daya.
 3. Kolaborasi Global: Mengembangkan kerjasama internasional untuk penelitian dan pengembangan yang relevan dengan target SDGs.
 4. Kesetaraan Akses Pendidikan: Meningkatkan akses bagi kelompok rentan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.
 5. Keterlibatan Komunitas: Mendorong peran aktif masyarakat dalam implementasi SDGs melalui pendidikan (Oktaviani et al., 2024).

Denagan adanya upaya penyelarasan SDGs dengan lembaga pendidikan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mendukung pencapaian target SDGs 2030. Hal ini dilakukan melalui langkah-langkah seperti pengintegrasian prinsip berkesinambungan dalam kurikulum, penerapan fasilitas ramah lingkungan, pengembangan kolaborasi global, peningkatan kesetaraan akses pendidikan, serta keterlibatan aktif komunitas. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat peran pendidikan dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

Implementasi Pendidikan inklusif dengan Program SDGs

Program SDGs fokus pada pentingnya memastikan akses pendidikan yang inklusif dan merata, serta mendorong kesempatan untuk pembelajaran sepanjang hayat bagi semua orang. SDG 4 mencakup beberapa target yang relevan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di daerah pedesaan, antara lain: memastikan semua anak menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah secara gratis, merata, dan dengan kualitas yang baik. Target ini pentingnya memberikan akses pendidikan yang setara dan inklusif bagi semua anak, termasuk di daerah pedesaan. Pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas akan memberikan dasar yang kuat untuk perkembangan intelektual, emosional, dan sosial anak (Zacky et al., 2024). Ketimpangan akses dan partisipasi dalam pendidikan memiliki dampak besar terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama bagi kelompok rentan seperti minoritas etnis, anak-anak dari keluarga miskin, dan individu penyandang disabilitas. Untuk mencapai target SDGs yang ambisius, diperlukan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan guna memastikan bahwa setiap individu mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan berkualitas serta kesempatan yang sama untuk berkembang. Dengan langkah ini, kita dapat menciptakan dunia yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi semua.

Pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Kualitas pendidikan dan inklusivitas kurikulum memainkan peran penting dalam mewujudkan visi ini, sejalan dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pendidikan berkualitas bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan juga pengembangan keterampilan, nilai-nilai, dan sikap yang dibutuhkan untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berkontribusi. Kurikulum yang menekankan pembelajaran holistik, pengembangan keterampilan abad ke-21, serta pemberdayaan siswa untuk berpikir kritis dan kreatif adalah komponen kunci dari pendidikan berkualitas. Dalam konteks SDGs, kualitas pendidikan dan kurikulum yang inklusif berkontribusi signifikan terhadap pencapaian berbagai target SDGs. Misalnya, SDGs menggaris bawahi pentingnya

menyediakan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan setara bagi semua. Dengan memastikan bahwa kurikulum mencerminkan keberagaman dan kebutuhan individu, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung bagi semua siswa, termasuk mereka yang berada dalam situasi rentan atau terpinggirkan (Hafshah, 2024).

SIMPULAN

Model pembiayaan pendidikan inklusif untuk mencapai SDGs di sektor pendidikan Islam Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan. Pembiayaan pendidikan inklusif melibatkan berbagai sumber dana, seperti pemerintah (melalui BOS dan dana desa), sektor swasta, filantropi Islam (zakat dan wakaf), serta kontribusi masyarakat. Integrasi sumber-sumber dana ini penting untuk menjamin keberlanjutan dan inklusivitas sistem pendidikan. Pengelolaan pembiayaan mencakup tiga tahapan utama, yaitu perencanaan (budgeting), akuntansi (accounting), dan evaluasi (controlling), yang harus dijalankan secara efektif agar penggunaan sumber daya menjadi optimal.

Berbagai strategi pembiayaan telah diterapkan di Indonesia, termasuk Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), peningkatan alokasi dana pendidikan, pendanaan berbasis desa, crowdfunding, kemitraan publik-swasta, dan pemanfaatan teknologi dalam pembiayaan pendidikan. Untuk mencapai SDGs, pendidikan Islam harus berfokus pada penyediaan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan setara, dengan memastikan akses bagi semua kelompok, termasuk mereka yang rentan dan penyandang disabilitas, serta mengembangkan kurikulum yang holistik dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Penerapan pendidikan yang sesuai dengan SDGs juga membutuhkan komitmen berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan infrastruktur pendukung, dan menjamin kesetaraan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Dukungan aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan Islam, sektor swasta, dan masyarakat, sangat penting untuk mentransformasi sistem pendidikan menuju model yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyahbana, M. I. (2022). *Permasalahan pendidikan di indonesia*. Sumatera Bara: CV AZKA PUSTAKA.
- Asdlori, A. (2023). PENDIDIKAN ISLAM SEBAGAI PILAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: PERAN SISTEM PENDIDIKAN PESANTREN DALAM IMPLEMENTASI SDGs. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 6(1), 124. <https://doi.org/10.32529/al-ilmi.v6i1.2530>
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA DALAM Mendukung Sustainable Development Goals, 6.
- Dewi, W. P., & Fadlullah, S. (2024). Implementasi Pendidikan Inklusif pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif Jenjang SMP di Kota Tangerang. *Journal of Education Research*, 5(1), 643–650.
- Ferdi W. P. (2013). Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 19(4), 565–578. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v19i4.310>
- Fihana, M. Y. O. (2024). Strategi dan Konsep Teoritis dalam Pembiayaan Pendidikan di Indonesia, 4(1).

- Hafshah, D. R. (2024). Dinamika Kesetaraan Pendidikan sebagai Fondasi SDGS. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1(3), 142–150.
- Humaida, N., Aula Sa'adah, M., Huriyah, H., & Hasanatun Nida, N. (2020). Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan (Sustainable Development Goals) Dalam Perspektif Islam. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(1), 131. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3483>
- I Made Winartha. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: CV Andi Offsh.
- Jannah, S. N. (2024). Pengelolaan Biaya Pendidikan Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *QAZI : Journal Of Islamic Studies*, 1, 30–36.
- Khaidir Fadil, Noor Isna Alfaien, & Ahmad Mulyadi Kosim. (2023). Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Islam Di Indonesia Dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goals (Sdgs). *Edupedia : Jurnal Studi Pendidikan Dan Pedagogi Islam*, 7(2), 127–142. <https://doi.org/10.35316/edupedia.v7i2.2513>
- Khairunnisa, K., Aprison, W., & Pratama, A. R. (2024). Mengintegrasikan Pembiayaan Pendidikan Islam dengan Kebijakan Nasional dalam Mewujudkan SDGs No . 4 : Kajian QS . Al-Mujadallah, 10(4).
- Masyhura, S. (2024). MODEL PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH : MENUJU. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP)*, 2(1), 236–247.
- Muchamad Irvan, M. N. J. (2018). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF SEBAGAI PERUBAHAN PARADIGMA PENDIDIKAN DI INDONESIA. *Buana Pendidikan: Jurnal FKIP Unipa Surabaya*, 26, 30–39. <https://doi.org/10.57008/jjp.v2i01.93>
- Muhammad Fikri Abdun Nasir. (2024). MEMBANGUN MADRASAH INKLUSIF : UPAYA MENUJU SEKOLAH RAMAH DIVERSITAS MELALUI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DI MADRASAH IBTIDAIYAH. *JPDI: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 6(1), 21–44.
- Nadhifa Ardiana Maharani, Fitri Hidayah, Diki Darmawan, & Syunu Trihantoyo. (2024). Analisis Sumber dan Jenis Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(3), 25–39. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v2i3.3004>
- Oktaviani, F., Attariqa, C. K., Pramesti, S. S. E., Soebianto, M. J., Jennuri, M. Y. E., Kusumaningrum, N., ... & Tarigan, W. A. (2024). *Akuntansi untuk Keberlanjutan Masa Depan*. Publisher SIEGA.
- Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42. <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>
- Safitri, A. O., Yuniarti, V. D., & Rostika, D. (2022). Upaya Peningkatan Pendidikan Berkualitas di Indonesia: Analisis Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). *JURNAL BASICEDU*, 6(4), 7096–7106.
- Sri Rokhlinasari, R. W. (2023). Zakat Sebagai Instrument Keuangan Syariah Inklusif dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals. *Journal*, 12(6), 3979–3988.
- Sudaryo, A. (2024). Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia, 1(1), 1–9.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Usman, Wartoyo, Haida, N., & Wahyuningsih, N. (2024). Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 11(1), 108–126.
- Vania Sasikirana, Y. T. H. (2020). URGENSI MERDEKA BELAJAR DI ERA REVOLUSI

INDUSTRI 4.0 DAN TANTANGAN SOCIETY 5.0, 08.
<https://doi.org/10.1007/XXXXXX-XX-0000-00>

Wulandari, C. E. (2024). Integrasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Kurikulum Pendidikan Islam: Sebuah Tinjauan Literatur. *TarbiyahMU*, 4(2), 22–28.

Zacky, M., Septianingsih, R., Setiawan, A. K., Nathanael, N. S., Yuliani, S., Ilmu, P., ... Berkelanjutan, P. (2024). PROGRAM PENDIDIKAN DESA BERKUALITAS SEBAGAI IMPLEMENTASI SDGS DALAM MENUNJANG BONUS DEMOGRAFI 2045: STUDI LITERATUR DESA TANJUNGSARI, CIAMIS, JAWA BARAT. *Cendikia Pendidikan*.